



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENINGKATAN KEMBALI HARGA MINYAK GORENG

**Ari Mulianta Ginting**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[ari.ginting@dpr.go.id](mailto:ari.ginting@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Harga minyak goreng curah dan MinyakKita kembali mengalami peningkatan. Data panel yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa harga jual minyak goreng curah melampaui harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Harga rata-rata minyak goreng mencapai Rp15.700 per liter. Harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi dari minyak goreng yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter.

Secara nasional, peningkatan harga minyak goreng pada bulan Maret 2024 mencapai harga Rp15.637 per liter. Peningkatan harga minyak goreng ini disebabkan oleh faktor rendahnya realisasi wajib pasok pasar domestik atau *domestic market obligation* (DMO) minyak goreng dari eksportir. Kebijakan DMO mewajibkan semua eksportir untuk memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor.

Penurunan pasokan DMO berdampak terhadap peningkatan harga minyak goreng curah dan MinyakKita. Hal ini disebabkan karena DMO terbanyak untuk memenuhi kebutuhan jenis minyak goreng curah dan MinyakKita. DMO masih belum dapat terpenuhi yaitu pada bulan Maret 2024 sebesar 85.975 ton. Angka ini masih jauh di bawah target DMO sebesar 300.000 ton. Angka realisasi DMO pada bulan Januari 2024 mencapai 212.116 ton dan di bulan Februari 2024 hanya mencapai 131.486 ton.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ada kecenderungan penurunan realisasi DMO akibat penurunan ekspor minyak sawit mentah. Tren ekspor yang menurun dapat dilihat dari hak ekspor para eksportir yang masih mencapai 5,58 juta ton atau setara 2,5 bulan. Penurunan ekspor ini disebabkan karena jumlah permintaan minyak mentah dari negara Cina dan India yang menurun. Kondisi ini diperparah dengan adanya persaingan harga minyak nabati lainnya yang lebih murah seperti *sunflower*, *canola*, dan *soybean oil*.

Kebijakan DMO mulai diberlakukan pada bulan Januari 2022. Ketika pemerintah mengganti kebijakan program minyak curah bersubsidi dengan mewajibkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri oleh para eksportir *Crude Palm Oil* (CPO). Kebijakan tersebut diatur dengan dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor CPO dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat.

Setelah pemerintah menerbitkan peraturan tersebut, pemerintah menetapkan harga Rp9.300 per kilogram (kg) sebagai harga jual CPO dan 20% kewajiban pasokan ke dalam negeri dalam rangka penerapan DMO. Persetujuan ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah merealisasikan ketentuan tersebut dengan cara memberikan bukti realisasi distribusi dalam negeri.

Peneliti ekonomi makro dan pasar keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menyatakan bahwa pemerintah perlu menyediakan kembali subsidi minyak goreng untuk mengatasi peningkatan harga. Beliau menyatakan bahwa kebijakan DMO belum berhasil mendorong pasokan dan menekan harga minyak.

## Atensi DPR

Harga minyak goreng curah dan MinyakKita mengalami tren peningkatan kembali, khususnya pada bulan Maret 2024. Harga rata-rata minyak goreng secara nasional berada pada harga Rp15.637 per liter. Harga ini berada di atas harga eceran tertinggi minyak goreng curah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Peningkatan harga minyak goreng ini disebabkan oleh faktor utama yaitu penurunan DMO minyak goreng dari para eksportir. Komisi VI DPR RI harus melakukan investigasi dan melakukan kebijakan terkait tata niaga minyak goreng di Indonesia. Perbaikan tata niaga minyak goreng dan perbaikan kebijakan terkait penentuan harga eceran tertinggi minyak goreng perlu dievaluasi secara komprehensif. Kebijakan DMO minyak goreng yang diterapkan sejak tahun 2022 terbukti belum dapat meredam peningkatan minyak goreng di Indonesia. Komisi VI DPR RI harus melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan untuk dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Tujuannya untuk mengendalikan tata niaga minyak goreng di Indonesia. Hal ini diperlukan agar harga minyak goreng menjadi stabil kembali.

## Sumber

antaranews.com, 29 Maret 2024;  
*Kompas*, 13 Maret 2024;  
*Koran Tempo*, 29 Maret 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024